

LKJIP



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lamongan, yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi. LKJIP ini sekaligus merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan strategik yang ditetapkan tersebut dapat mewujudkan sasaran dan tujuan yang diharapkan tercapai.

Penyusunan LKJIP BPBD ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BPBD Kabupaten Lamongan telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan ini telah dapat mencerminkan kinerja BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2023.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga BPBD Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik - baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, Desember 2023

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**


JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19780514 199711 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kemampuan mempertanggungjawabkan dari suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama Tahun 2023 dan mengacu pada Renstra BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja Tahun 2023.

Untuk Mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”** dan misi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana adalah Misi, yaitu **Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan.**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPBD Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2023 ini dapat dikatakan kinerja BPBD Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai BPBD Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, BPBD Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Lamongan adalah masih Kurangnya staf pada BPBD Kab. Lamongan yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja BPBD Kabupaten Lamongan, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Lamongan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Gambaran Umum Organisasi	5
D. Sitematika Penyajian LkjIP Tahun 2023.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2023	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Tahun Organisasi.....	27
1. Pencapaian Kinerja.....	27
2. Perbandingan Realisasi Kinerja.....	30
3. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir RPJMD/Renstra..	31
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.....	32
5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan.....	32
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	32
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja.....	36
B. Realisasi Anggaran.....	36
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
LAMPIRAN – LAMPIRAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKJIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan secara ex-Officio sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari :

- a. Pejabat Pemerintah Daerah
- b. Anggota masyarakat profesional dan ahli

Unsur Pengarah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

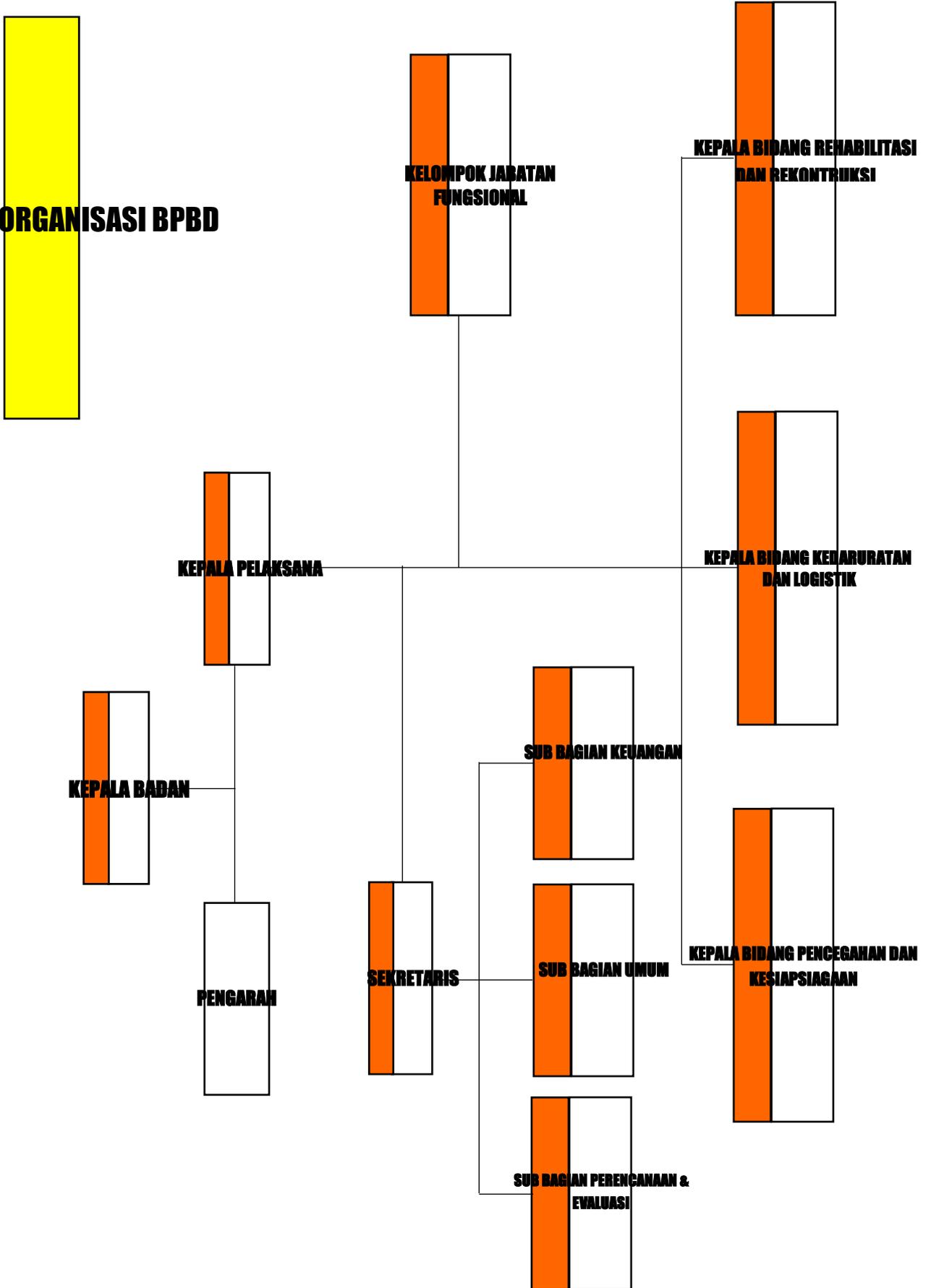
3. Unsur Pelaksana

a. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

b. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- Kepala Pelaksana
- Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BPBD



C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil

BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan . Susunan Organisasi/Personil BPBD terdiri dari :

- a) Kepala Pelaksana
- b) Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d) Bidang Kedaruratan dan Logistik
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Adapun data personil BPBD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Ket.
1.	JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP	Kepala Pelaksana	
2.	MOHAMMAD ANWAR, S.Si.,M.Si	Sekretaris	
3.	GUNAWAN, SE	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
4.	SUMARDI, S.H.,M.H	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	
5.	KUNTJORO,S.E.,M.M	Plt Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	
6.	IRFAN HARIADI,S.T	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	
7.	PEPEN TEGUH A,S.Sos	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	
8.	NASIKIN,S.Sos	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	
9.	FITRIASIH, S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	

No	Nama	Jabatan	Ket.
10.	AINIS YUNITA DEWI,S.E.,M.M	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
11.	R. PRIMADINI LESTARI, S.Psi, MM	Kepala Sub Bagian Keuangan	
12.	MUSTARI, SE	Staf	
13.	SLAMET PRAMONO	Staf	
14.	RR MASHITA F, S.Si	Staf	
15.	SUKAERI	Staf	
16.	ABI FITRIANSYAH,S.E	Staf	
17.	AGUS SUTOMO	Tenaga Administrasi	
18.	LILIK MURTOMO	Tenaga Administrasi	
19.	MOCH FARID NURCAHYO	Tenaga Administrasi	
20.	ANGGA ADI KURNIAWAN	Tenaga Administrasi	
21.	INDRA SUSANTO	Tenaga Administrasi	
22.	DITA SETIAWAN, SP	Tenaga Administrasi	
23.	RINA APRILIA, SPD	Tenaga Administrasi	
24.	SAIFUDDIN JEFRI	Tenaga Administrasi	
25.	WAHYU BAGUS P.	Tenaga Administrasi	
26.	WULAN SARI, S.Pi	Tenaga Administrasi	
27.	HAMIDAH, S.M	Tenaga Administrasi	
28.	NUR KHASANAH, SE	Tenaga Administrasi	
29.	MUHAMMAD ABDUL GHOFUR	Tenaga Administrasi	
30.	RESTU INDRA NURANI, SH	Tenaga Administrasi	
31.	ASTRID VALERINA L.S	Tenaga Administrasi	
32.	ARDA DIYA ABIEUKA	Tenaga Administrasi	
33.	BAYU PAMUNGKAS	Tenaga Administrasi	
34.	ANDI WALUYO	Tenaga Administrasi	
35.	GILANG FRISMA N.P	Tenaga Administrasi	
36.	TRI HANIF	Tenaga Administrasi	
37.	KISWANTORO	Tenaga Administrasi	
38.	MOCH HENDRO BUDI S.	Tenaga Pengemudi	
39.	MUHAMMAD LUKMAN	Tenaga Kebersihan	
40.	EDI SHOBIRIN	Agen Bencana	
41.	AHMAD FARID RIZKY	Agen Bencana	

2. Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur dan semakin meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan khususnya dalam penanggulangan bencana serta dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi BPBD Kabupaten Lamongan, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Daftar Kendaraan Dinas dan Operasional

No.	Uraian	Jumlah
I.	Kendaraan Dinas	
	1. Kendaraan Dinas Roda 4	
	- Kendaraan Dinas Eselon II	1 Unit
	- Kendaraan Dinas Eselon III	3 Unit
	2. Kendaraan Dinas Roda 2	
	- Kendaraan Dinas Eselon IV	6 Unit
II.	Kendaraan Operasional	
	1. Kendaraan Operasional Roda 6	
	- Truk Tangki Air	5 Unit
	- Truk Logistik 1 Unit	1 Unit
	2. Kendaraan Operasional Roda 4	
	- Mobil Rescue	1 Unit
	- Mobil pick Up	2 Unit
	3. Kendaraan Operasional Roda 3	
	- Tossa	2 Unit
	4. Kendaraan Operasional Roda 2	
	- Motor Trail	12 Unit

Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Uraian	Jumlah
1.	Almari	22 Unit
2.	Almari Arsip/ Rak Arsip	3 Unit
3.	Filling Cabinet	15 Unit
4.	Kursi Lipat	123 Unit
5.	AC	24 Unit
6.	Televisi	1 Unit
7.	Tangga Lipat	1 Unit
8.	PC	19 Unit
9.	Notebook	14 Unit
10.	Printer	25 Unit
11.	Meja Kerja Eselon II	2 Unit
12.	Meja Kerja Eselon III	8 Unit
13.	Meja Kerja Eselon IV	12 Unit
	Meja Non Struktural	25 Unit
14.	Meja Kerja Staf	19 Unit
15.	Kursi Kerja Eselon II	2 Unit
16.	Kursi Kerja Eselon III	4 Unit
17.	Kursi Kerja Eselon IV	11 Unit
18.	Kursi Staf	30 unit
19.	Kamera	8 Unit
20.	Handycam	5 Unit
21.	LCD Proyektor	1Unit
22.	HT	10 Unit
23.	Wireless (Wireles Adapter)	10 Unit
24.	Stabilisator (UPS / Stabilizer)	1 Unit
25.	Camera Video (Kamera Drone)	1 Unit

No.	Uraian	Jumlah
26	Router (Router / Switch Waireles)	3 Unit
27	Unit Transceiver VHF Portable (Radio RIG)	1 Unit
28	Unit Transceiver UHF Stationary (Radio Repeater)	1 Unit
29	CCTV 6 Channel (CCTV 6 Titik)	1 Unit
30	Mast Tower (Tower Radio RIG)	1 Unit
31	Perahu Penumbang (Perahu Rakit)	3 Unit
32	Mesin Bor (Bor Listrik)	1 Unit
33	Mesin Kompresor (kompresor Angin)	1 Unit
34	Mesin Kompresor (Kompresor Air)	1 Unit
35	Mesin Las Listrik (Peralatan las listrik)	1 Unit
36	Lain-lain (EWS BANJIR TELEMETRI (SMS GATE WAY))	1 Unit
37	Mesin Absensi (Mesin Absensi)	1 Unit
38	Lain-lain (Jaket Pelampung)	20 Unit
39	Modem (Modem)	2 Unit
40	Sound System (Sound System)	1 Unit
41	Faximile	1 Unit

3. Pembiayaan

Guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2023, dalam pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

Perangkat Daerah / Program / kegiatan	Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.717.158.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.625.608.950
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.091.549.550

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Perangkat Daerah Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.717.158.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.625.608.950
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.344.610.750
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.304.610.750
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.995.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.575.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.420.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.779.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.400.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.047.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, BPBD Kabupaten Lamongan adalah Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BPBD Kabupaten Lamongan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

1. Tugas BPBD

BPBD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggaulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi yang adil dan setara, sesuai dengan kebijakan Pemerintah, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

2. Fungsi BPBD

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana termasuk Bencana Kebakaran;
- c. Penyusunan pedoman Operasional terhadap Penanggulangan Bencana;
- d. Penyampaian Informasi kegiatan Penanggulangan Bencana pada Masyarakat.
- e. Penggunaan dan Pertanggung jawaban sumbangan / bantuan.
- f. Pelaporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 1 tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, maka bersama ini disajikan Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.832.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.535.000
Pengadaan Mebel	20.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.535.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.964.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.900.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.064.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.724.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.006.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.880.100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.038.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.091.549.550
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	408.920.000
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	318.920.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	528.555.100
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000

Pelatihan Pencegahan dan Mtigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	52.860.100
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	34.400.000
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	231.295.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.154.450
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	884.154.450
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	234.920.000
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	14.920.000
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	150.000.000

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Lamongan pada Tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis BPBD Kabupaten Lamongan, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kerja,

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2023

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023,

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Lamongan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.

Bab IV – Penutup,

Menjelaskan simpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran – melampirkan tabel RKT, Evaluasi Renja, Rencana Aksi, monitoring rencana aksi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2025. Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026 serta RPJM Nasional Tahun 2005-2025 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2026 adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

Misi 3.

1. Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan layanan infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, kelestarian lingkungan hidup daerah dan meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan bencana.

2. Sasaran dan indikator kinerja

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2022-2026 adalah:



B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Dengan memperhatikan rancangan awal dan berpedoman pada Renstra, BPBD Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dari Renja yang telah disusun kemudian BPBD Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA yang memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran.

Keterkaitan antara Renja dan RKA adalah RKA memuat informasi yang tertuang dalam Renja, termasuk informasi alokasi pendanaan yang telah dimutakhirkan sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah (resources envelope). Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Lamongan, dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

1. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan dana yang bersumber dari APBD Daerah Kabupaten Lamongan dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	PROGRAM	KEGIATAN
Mewujudkan Kapasitas Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

			<p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
			<p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			<p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

				<p>4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
				<p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Pengadaan Mebel</p> <p>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>
				<p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka</p> <p>3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
				<p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah</p>

				<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	<p>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) <p>Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>

				<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 3. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 5. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Presentase korban terdampak bencana yang ditangani	Program Penanggulangan Bencana	<p>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 3. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik

				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Presentase Pemulihan Pasca Bencana yang dilaksanakan		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1. Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 3. Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Lamongan ini memuat dua unsur pokok, yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a) Konsistensi, keselarasan dan proporsionalitas dalam menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) ke dalam penetapan prioritas program /kegiatan dan alokasi anggaran.
- b) Ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja.
- c) Ketepatan dalam mengestimasi target kinerja dari setiap indikator kinerja.

d) Obyektivitas dalam pengukuran kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMMDP) Tahun 2022-2026, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan Rencana Kinerja Tahun 2022. Berikut Tabel Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.

**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	70%
		Presentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	100%
		Presentase Pemulihan Pasca Bencana yang Dilaksanakan	100%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87,70

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Nilai IKM	Nilai IKM Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85,50

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen
3.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	5 Dokumen

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian KORPRI dan Jersey Persela	43 setel
2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah BIMTEK	2 Kali
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Kompo nen
4.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	100%
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Persentase Alat Tulis Kantor Yang Dipenuhi	100%
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	100%
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%
8	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
9	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayarkan	4 Rekening
10	Tercukupinya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
11	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	100%
12	Tersedianya Jasa Pelayananan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tenaga Kebersihan Tenaga Supir	23 Orang 1 Orang 1 Orang
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prsentase Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	100%

14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%
15	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit
16	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitas Gedung	1 Gedung

Sub Bagian Keuangan

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase gaji dan tunjangan yang di terima pegawai BPBD	100 %
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semester yang disusun	2 Dokumen

Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Presentase Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Desa yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang	25 Desa

		Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	
2	Tersedianya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen
3.	Tersedianya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan
2.	Tersedianya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	3 Desa
4.	Tersedianya Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen
5.	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Apel	1 Apel

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Plt Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Presentase Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Presentase Bantuan Masyarakat yang terdampak bencana	100%

Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi

Kepala Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Presentase Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana	Jumlah bantuan akibat puting beliung dan tanah longsor, Jumlah bantuan bahan bangunan, jumlah pelaksanaan pendataan kerusakan dan kerugian pasca bencana	6 Paket, 6 Paket, 1 Dokumen

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian Pasca Bencana	Jumlah Regulasi pengkajian kebutuhan pasca bencana	1 Aturan/ Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2023 ini didasarkan kepada pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2023 dengan realisasinya.

1. Pencapaian kinerja

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi BPBD memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Lamongan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan Kabupaten pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencan	70%	70%	100%
2	Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani	100%	100%	100%
3	Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Lingkup Bidang Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- a) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000 Yang dipergunakan untuk Dokumen KRB, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.89.377.200 atau 99.30%, Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- b) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan alokasi dana sebesar Rp. 318.920.000 Yang dipergunakan untuk sosialisasi 25 Desa, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.318.821.400 atau 99.96%, Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- a) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 110.000.000 dipergunakan untuk Dokumen RPB Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 99.027.200 atau 90.02%, Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- b) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000 dipergunakan untuk 3 Desa Tangguh Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 99.621.700 atau 99.62%, Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- c) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 52.860.100 dipergunakan untuk 12 Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.722.000 atau 16.50%, Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- d) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 34.400.000 Yang dipergunakan 10 Orang Personil TRC yang dikembangkan kapasitas Teknis dan Manajerialnya, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 29.825.400 atau 86.70% Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- e) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan alokasi dana sebesar Rp. 231.295.000 Yang dipergunakan Apel Hari Kesiapsiagaan Nasional, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 230.432.500 atau 99.62%, Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

3. Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000 yang dipergunakan untuk Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 19.351.000 atau 96.75%. Sedangkan realisasi fisik mencapai

100%.

- b) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk melakukan Pencarian dan Evakuasi Korban Per jenis Bencana. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 11.325.000 atau 75.50% Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- c) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.884.154.450 yang dipergunakan untuk belanja bahan banjiran (bongkotan 390 Batang, gedeg guling 657 m, karung 2100 Lembar dan 6500 Paket Sembako) dan belanja Air Bersih 250000 Liter. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 864.410.250 atau 97.76%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- a) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.70.000.000 yang dipergunakan untuk Dokumen Regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 44.448.000 atau 63.49%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%
- b) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.920.000 yang dipergunakan untuk 1 Dokumen tata kelola Kelembagaan Bencana Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 11.529.900 atau 77,27%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- c) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota)dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000 yang dipergunakan untuk dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota melalui pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu pasna) Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000.000 atau 100%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu:

85 - 100	:	Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 - 85	:	Baik / Berhasil
55 - 70	:	Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55	:	Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

2. Perbandingan realisasi kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2022	2023	
			Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	67.5%	70%	70%
		Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani	100 %	100%	100 %
		Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan	100 %	100%	100 %

1. Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana

Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana,

- Tahun 2022

Rencana pembentukan desa tangguh 4 desa dan terlaksana keseluruhannya yaitu 4 desa, sehingga telah memenuhi target 100%

- Tahun 2023

Rencana pembentukan desa tangguh 4 desa dan terlaksana keseluruhannya yaitu 4 desa, sehingga telah memenuhi target 100%

2. Pengendalian bencana alam saat tanggap darurat tahun 2023 lebih cepat tercapainya dibandingkan Tahun 2022 oleh karena :

- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung baik sarana mobilitas dan alat penanganan saat tanggap darurat :
 - Bertambahnya Alat SAR
 - Bahan – Bahan logistik lainnya
- Kesiapan Tenaga Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan saat terjadi bencana karena didukung adanya pelatihan – pelatihan baik yang diadakan sendiri dan eksepsi ke kabupaten, Propinsi dan Pusat.
- Leadership / kepemimpinan pada level top manager sampai dengann bawahan lebih terorganisasi dengan baik.
- Perencanaan program darin bottom up / masukan dari bawah yang diakomodasi melalui program – program kegiatan

3. Pengendalian bencana alam pasca bencana sangat ditentukan oleh tahapan pengendalian bencana mulai prabencana saat bencana dan pasca bencana ;

- a) Pada tahun 2022, keterpaduan antara pengendalian bencana saat pra bencana sampai pasca bencana kurang adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga kegiatan yang dilakukan bersifat parsial. Sedangkan Tahun 2023 pengendalian pasca bencana lebih sinergi antar bidang sehingga program dan kegiatan lebih berhasil.
- b) Pada Tahun 2022 Informasi kebencanaan belum dilaksanakan secara massiv, sedangkan Tahun 2023 informasi kebencanaan lebih massiv dan terdapat aplikasi pasca bencana yakni INARISK, dengan aplikasi ini nilai kerentanan bencana (Indeks bencana) bobot-bobot yang kurang bisa ditingkatkan / antisipasi, misalkan dengan program – program perbaikan tanggul sungai, normalisasi sungai, perbaikan saluran air dan jalan serta jembatan dapat diperbaiki kualitasnya.
- c) Pada Tahun 2022 faktor kerugian dan kerusakan akibat bencana pada tahap pasca bencana belum dapat ditentukan baik sektor pertanian, perikanan maupun fisik perumahan, jalan / jembatan, akan tetapi pada tahun 2023 sudah dapat diproyeksikan, sehingga koordinasi dengan OPD teknis dapat berjalan dengan baik.
- d) Pada Tahun 2022 monitoring terhadap kerusakan pasca bencana belum dilakukan secara koordinatif dan parsial, sedangkan pada tahun 2023 dilakukan secara koordinatif.

3. Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RJMD/RENSTRA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Renstra dan RPJMD	Prosentasi Capaian Kinerja
		Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.65	0.62	105%
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencan	%	70%	70%	70%
		Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani	%	100%	100%	100%
		Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan	%	100%	100%	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional

Standart Pelayanan Minimal yang di tetapkan pemerintah melalui Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 SPM Sub urusan Bencana Daerah.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standart Pelayanan Minimal		Realisasi Kinerja
		Indikator	Nilai	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%

5. Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (ANJAB) berjumlah 11 orang, sehingga saat ini sumber daya aparatur telah mencapai 11 orang sehingga sudah termasuk ideal dari Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-OPD maupun Standart Pelayanan Minimal yang di tetapkan pemerintah melalui Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 SPM Sub urusan Bencana Daerah.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 5.717.158.500,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. **5.440.957.667,00**(Lima Milyar

Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau 95,16 %. dengan rincian sebagai berikut :

Perangkat Daerah / Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.717.158.500	5.440.957.667
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.625.608.950	3.464.066.117
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.091.549.550	1.976.891.550

Perangkat Daerah / Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.717.158.500	5.440.957.667
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.625.608.95	3.464.066.117
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000	118.186.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.659.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	29.424.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	64.102.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.344.610.750	2.262.731.088
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.304.610.750	2.222.902.988
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.500.000	21.396.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.500.000	18.431.900
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.995.000	36.188.229
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.575.000	28.575.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.420.000	7.613.220
Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.779.500	162.465.570
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000	10.400.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.400.000	9.400.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.047.000	58.710.350
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	17.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	15.280.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.832.500	51.675.220
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.535.000	71.750.000
Pengadaan Mebel	20.000.000	19.250.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.535.000	52.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.964.000	599.748.530
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.900.000	87.634.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.064.000	492.114.440
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.724.700	212.996.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.006.600	70.004.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	128.880.100	96.191.700

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.800.000	16.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.038.000	30.000.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.091.549.550	1.976.891.550
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	408.920.000	408.198.600
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000	318.821.400
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	318.920.000	89.377.200
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	528.555.100	467.628.800
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	99.027.200
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	99.621.700
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	52.860.100	8.722.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	34.400.000	29.825.400
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	231.295.000	230.432.500
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.154.450	895.086.250
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	19.351.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	11.325.000

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	884.154.450	864.410.250
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	234.920.000	205.977.900
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	44.448.000
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	14.920.000	11.529.900
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat / stake holders dalam bentuk kegiatan jempit bola.

B. REALISASI ANGGARAN

LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Sebagai lembaga di daerah yang diserahi tugas untuk melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana maka tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Lamongan juga disinkronisasi dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah di Bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. adapun Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh BPBD Kabupaten Lamongan dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan tahun 2023 sebesar Rp. 5.717.158.500,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 5.440.957.667,00 (Lima

Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), atau 95,16 %, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Perangkat Daerah / Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.717.158.500	5.440.957.667
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.625.608.950	3.464.066.117
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.091.549.550	1.976.891.550

Perangkat Daerah / Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.717.158.500	5.440.957.667
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.625.608.95	3.464.066.117
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000	118.186.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.659.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	29.424.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	64.102.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.344.610.750	2.262.731.088
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.304.610.750	2.222.902.988
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.500.000	21.396.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.500.000	18.431.900
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.995.000	36.188.229
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.575.000	28.575.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.420.000	7.613.220
Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.779.500	162.465.570
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000	10.400.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.400.000	9.400.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.047.000	58.710.350
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	17.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	15.280.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.832.500	51.675.220
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.535.000	71.750.000
Pengadaan Mebel	20.000.000	19.250.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.535.000	52.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.964.000	599.748.530
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.900.000	87.634.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.064.000	492.114.440
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.724.700	212.996.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.006.600	70.004.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	128.880.100	96.191.700

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.800.000	16.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.038.000	30.000.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.091.549.550	1.976.891.550
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	408.920.000	408.198.600
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000	318.821.400
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	318.920.000	89.377.200
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	528.555.100	467.628.800
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	99.027.200
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	99.621.700
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	52.860.100	8.722.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	34.400.000	29.825.400
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	231.295.000	230.432.500
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.154.450	895.086.250
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	19.351.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	11.325.000

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	884.154.450	864.410.250
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	234.920.000	205.977.900
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	44.448.000
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	14.920.000	11.529.900
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2022–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lamongan pada tahun 2023.

Secara umum pada Tahun Anggaran 2023 BPBD Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dibebankan, serta dapat pula memenuhi sasaran. Fungsi utama yang diharapkan dari BPBD Kabupaten Lamongan yakni penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, BPBD Kabupaten Lamongan mendapatkan alokasi dana belanja langsung untuk tahun anggaran Kabupaten Lamongan tahun 2023 sebesar Rp. 5.717.158.500,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 5.440.957.667,00 (lima milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), atau 95,16 %.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Khususnya dalam petugas lapangan dari TRC (Tim Reaksi Cepat) dan Pusdalops.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal BPBD Kabupaten Lamongan, terbatasnya jumlah kendaraan operasional, dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK, Arsip dan Aset Barang Milik BPBD Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, kami melakukan evaluasi dan melakukan perencanaan untuk menjadikan yang lebih baik lagi untuk menjadi landasan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

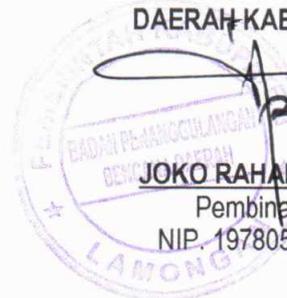
1. Melakukan Perencanaan kinerja dan penganggaran yang seefektif mungkin untuk mempercepat penganggaran di tahun-tahun berikutnya sehingga tidak harus melakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang akan berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Memaksimalkan petugas-petugas lapangan yang ada saat ini dan juga berusaha untuk melakukan penambahan-penambahan personilpetugas lapangan dari TRC (Tim Reaksi Cepat) dan Pusdalops.
3. Melakukan upaya-upaya menambah Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti sistem informasi bersama internal BPBD Kabupaten Lamongan, jumlah kendaraan operasional, dan gudang penyimpanan ATK, Arsip dan Aset Barang Milik BPBD Kabupaten Lamongan.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lamongan dalam bentuk koordinasi teknis dengan Instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan. Perlu digaris bawahi bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Intansi Pemerintah oleh BPBD Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya perbaikan -perbaikan, baik format penyajian maupun dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada.

Akhirnya semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua.

Lamongan, Desember 2023

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**




JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780514 199711 1 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan

MISI 3 : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan

SASARAN : Meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)	
Mewujudkan Kapasitas Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran lembaga desa dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan.	Memfasilitasi terbentuknya desa tangguh bencana di daerah rawan bencana.	
			Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana.	
			Peningkatan kegiatan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana	
		Peningkatan pemulihan kerusakan pasca bencana.	Memperkuat tim JITUPASNA.	
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Koordinasi multi pihak saat status keadaan darurat.	Peningkatan Koordinasi multi pihak saat status keadaan darurat.	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Teknis/Tekait dan pihak Swasta.
				Penyiapan Struktur dan Mekanisme Komando Tanggap Darurat.
			Peningkatan Koordinasi multi pihak saat status keadaan darurat.	Penyiapan logistik dan tempat evakuasi korban bencana.
				Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran
		Mengusulkan pendidikan dan pelatihan secara berkala.		

TABLE LINEARITAS ARAH KEBIJAKAN RPJMD DENGAN RESTRA PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2023	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas dan Jumlah Desa Tangguh Bencana	Memfasilitasi terbentuknya desa tangguh bencana di daerah rawan bencana.	√	√	√	√	√
		Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana.	√	√	√	√	√
2	Optimalisasi Mitigasi Bencana	Peningkatan kegiatan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana	√	√	√	√	√
		Memperkuat tim JITUPASNA.	√	√	√	√	√
3	Optimalisasi Penanganan Bencana	Penyiapan Struktur dan Mekanisme Komando Tanggap Darurat.	√	√	√	√	√
		Penyiapan logistik dan tempat evakuasi	√	√	√	√	√

		korban bencana					
4	Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam penanganan bencana	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Teknis/Tekait dan pihak Swasta.	√	√	√	√	√



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP.
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.
Jabatan : Bupati Kabupaten Lamongan
Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, September 2023

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780514 199711 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	70%
		Presentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	100%
		Presentase Pemulihan Pasca Bencana yang Dilaksanakan	100%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87,70

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.735.529.450,00	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.191.549.550,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 5.927.079.000,00	

Lamongan, September 2023

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780514 199711 1 001